



**PEMILU DAN POLARISASI POLITIK: TANTANGAN MEMBANGUN
HARMONISASI MASYARAKAT DI DESA TONGKO KECAMATAN BAROKO
PASCA PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN ENREKANG 2024**

***ELECTIONS AND POLITICAL POLARISATION: THE CHALLENGE OF BUILDING
COMMUNITY HARMONISATION IN TONGKO VILLAGE, BAROKO SUB-DISTRICT
AFTER THE 2024 ENREKANG DISTRICT REGENT ELECTION***

Alim Bahri, Afin Abrori, Ahmad Multazam, Muhammad Al-Asri A,

Iis Astriani, Sutriani, Musfirah, St. Aisyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI) Mangkoso

Jl. H. Abdurrahman Ambo Dalle, Kampus 1 Pondok Pesantren DDI Mangkoso

Email: alimhasnawi171102@gmail.com, afinabrori3@gmail.com, ahmadmultazam0610@gmail.com,
muhalasri129@gmail.com, iisastriani11@gmail.com, sutrianyyanhi@gmail.com,
musfirasyammusfirasyam@gmail.com, Sitti.aisyah2004@gmail.com.

0895329838614, 081286284383, 081918410930, 085696031464, 082346648209,

082350837064, 082193126882, 081354920467

Submission:29-12-2024

| Review:18-02-2025

| Published: 20-02-2025

Keywords :

*Election, Political Polarisation,
Society, Regent, Enrekang*

ABSTRACT

Elections and Political Polarisation: The Challenges of Building Community Harmony in Tongko Village, Baroko Subdistrict after the 2024 Enrekang Regency Regent Election is an interesting issue that is increasingly being discussed by the Tongko village community. It becomes a separate question in the midst of the Tongko village community regarding the challenges of building harmonisation after the election was held. Researchers deliberately chose to examine this issue with the aim of finding out what is the root of the problem why the Regent election in Enrekang Regency this year is very heated, in addition researchers also want to know more deeply what the impact of political polarisation is and how to deal with it after the election takes place. The research method used in this research is research with a qualitative approach. The results of this study found that the root cause of why this year's regent election was so heated was because there were two pairs of candidates who were close relatives. The effects and impacts of political polarisation can create social fragmentation, disrupt daily life, decrease community credibility and have an impact on government. Therefore, among the efforts to rebuild community harmony is to instill and implement the values of Pancasila, instill and implement the harmonious values of Bhinneka Tunggal Ika, instill religious values, build dialogue spaces, parties and leaders who play an active role.

Kata kunci :

Pemilu, Polarisasi Politik,
Masyarakat, Bupati, Enrekang

ABSTRAK

Pemilu dan Polarisasi Politik: Tantangan Membangun Harmonisasi



Masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Baroko Pasca Pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2024 merupakan isu menarik yang kian hangat diperbincangkan oleh masyarakat desa Tongko. Menjadi pertanyaan tersendiri di tengah-tengah masyarakat desa Tongko mengenai tantangan membangun harmonisasi pasca pemilu itu dilaksanakan. Peneliti sengaja memilih untuk meneliti permasalahan ini dengan tujuan ingin mengetahui apa yang menjadi akar masalah mengapa pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang tahun ini sangat memanas, di samping itu peneliti juga ingin mengetahui lebih dalam apa dampak dari polarisasi politik dan bagaimana cara untuk menghadapinya pasca pemilu itu berlangsung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa yang menjadi akar permasalahan mengapa pemilihan bupati tahun ini sangat memanas karena terdapat dua pasangan calon yang merupakan keluarga dekat sendiri. Efek dan dampak dari polarisasi politik dapat membuat fragmentasi sosial, mengganggu kehidupan sehari-hari, menurunnya kredibilitas masyarakat dan berdampak pada pemerintahan. Oleh karena itu di antara upaya untuk membangun kembali keharmonisan masyarakat adalah dengan menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, menanamkan dan mengimplementasikan nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika, menanamkan nilai-nilai keagamaan, membangun ruang dialog, serta partai dan pemimpin yang berperan aktif.

A. PENDAHULUAN

Dari perspektif keamanan dan stabilitas politik, penyelenggaraan Pemilu 2024, apalagi dilakukan secara serentak, menghadapi tantangan dan kekhawatiran besar bagi kelanggaan persatuan, integrasi Nasional, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Munculnya tantangan dan kekhawatiran tersebut setidaknya didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, Indonesia masih termasuk kedalam negara dengan kategori transisi demokrasi atau paling tidak, demokrasinya belum mengalami transisi demokrasi, terutama ketika penyelenggaraan pemilu, seringkali ditandai dengan gesekan sosial.¹ Kedua, Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling majemuk dan multikultural di dunia baik dari segi wilayah, suku, agama, etnis, bahasa, dan juga budaya. Dengan tingkat kemajemukan dan multikultural yang demikian, perbedaan ideologi, keyakinan, paham, dan calon pemimpin yang didukung seringkali menjadi pemantik perpecahan dan polarisasi di masyarakat ketika pesta demokrasi sedang berlangsung.²

¹ Guillermo O'donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian* (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 6.

² Winarko Sihwidodo, *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Pasca Pemilu Serentak 2024 Guna Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: Lemhannas RI, 2024), h. 1-2.



Polarisasi adalah salah satu istilah yang sering kita dengan dalam dunia politik. Polarisasi politik adalah pembagian masyarakat dalam pandangan dan dukungan politik mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang berbeda pendapat dalam pandangan dan kebijakan politik.³ Dalam studi politik, fenomena polarisasi tidak hanya muncul sebelum pemilu saja, tetapi fenomena polarisasi ini kerap berlanjut pasca pemilu.⁴ Polarisasi dapat mengancam keharmonisan masyarakat, memperburuk perseteruan serta menurunkan kualitas demokrasi. Polarisasi politik bisa membuat rakyat terpecah belah dan berpotensi menyebabkan pertarungan yang merugikan semua pihak.

Oleh karena itu, penting untuk tahu kenyataan polarisasi politik serta mencari cara untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi dampaknya. Dalam konteks pemilu, polarisasi seringkali terjadi saat 2 kandidat atau partai yang mempunyai pandangan yang berbeda. Pasca pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang 2024, polarisasi politik semakin terlihat di masyarakat, khususnya di masyarakat Desa Tongko Kecamatan Baroko. Polarisasi politik pasca pemilu yang berdampak pada harmonisasi masyarakat di Desa Tongko, dari 3 kandidat terdapat 2 kandidat yang sama-sama kuat, yaitu pasangan Mitra Fakhruddin-Mahmuddin dan Muhammad Yusuf-Andi Tenri Liwang La Tinro, hal ini berakibat ada 2 kubu yang saling bertentangan sehingga muncul julukan “ramah” dan “kawan”.

B. METODE PENELITIAN

Jurnal kami yang berjudul Pemilu dan Polarisasi Politik: Tantangan Membangun Harmonisasi Masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Baroko Pasca Pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang 2024 menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan berusaha menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.⁵ Pendekatan kualitatif juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku atau pandangan orang yang diamati.⁶ Metode penelitian dengan melakukan pendekatan kualitatif sejalan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang penting agar bisa memahami suatu fenomena sosial dan deskriptif individu yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk bisa menggambarkan,

³ Syifa Rianadiwa, dkk, “Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024”, *Jurnal Sosial Humaniora* 4 no. 1 (2024): 170.

⁴ Ibnu Chaerul Mansyur, “Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka, *Jurnal Politik Profetik* 11, no. 1 (2023): h. 10.

⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 7.

⁶ Wahyuni, “Pengembangan Koleksi Jurnas Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 21.



memahami dan menjelaskan fenomena tersebut.⁷ Fokus penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami, menggali pandangan dan pengalaman untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.⁸ Adapun referensi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan artikel yang membahas tentang polarisasi politik pasca pemilu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Polarisasi Politik

Kata polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan, magnetisasi, pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Dengan kata lain polarisasi merupakan pembagian masyarakat dalam menyikapi isu-isu politik. Polarisasi politik merujuk kepada terpecahnya masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan politik, yang mana dalam perpecahan ini muncul rasa saling tidak percaya dan kebencian, sehingga memunculkan permusuhan.⁹ Ilmuan politik membagi dua tingkatan polarisasi politik yaitu polarisasi elit dan polarisasi massa, polarisasi elit berpusat pada polarisasi elit politik seperti pengurus partai dan pejabat terpilih. Sedangkan polarisasi massa berfokus pada massa seperti para pemilih atau masyarakat umum.

Polarisasi tak hanya terjadi di Indonesia saja, polarisasi juga terjadi di negara-negara dunia seperti Amerika dan Inggris. Polarisasi politik dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam pemilihan umum, kebijakan publik, maupun isi-isi sosial budaya.¹⁰ Pada masa pemilihan umum polarisasi sering terjadi dan mencerminkan perpecahan antara partai politik dengan pendukung mereka. Perbedaan pemahaman dan tujuan diantara partai-partai politik dapat menyebabkan polarisasi yang intens, dimana masyarakat terbagi menjadi kubu-kubu yang saling berlawanan. Penyebab terjadinya polarisasi politik antara lain partai politik, media massa, pemekaran wilayah, konteks politik dan ideologi politik masyarakat.

Polarisasi politik di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru lagi, pada era orde baru dan reformasi polarisasi politik sempat mereda. Namun, polarisasi kembali muncul pada tahun 2014 dan berlanjut sampai tahun 2019, sejak tahun itu juga Indonesia menghadapi polarisasi politik yang sangat mengkhawatirkan setiap kali berlangsungnya pemilihan umum baik pimpinan eksekutif di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten. Perpaduan antara

⁷ Syamsuddin dan Damaianti, *Metode Penelitian dan Pendekatan Bahasa* (Bandung: Remaja Rosdakarnya, 2007), h. 74.

⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11.

⁹ Ibnu Chaerul Mansyur, "Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka, *Jurnal Politik Profetik* 11, no. 1 (2023): h. 5.

¹⁰ Isrofiah L aela Khasanah dan Fadli Zumadila Wawuan, "Polarisasi Politik dan Rekonsiliasi Melalui Halal Bihalal, *Jurnal Ilmu Muqoddimah* 7 no. (2023): h. 423.



populisme, politik identitas, dan hoaks melahirkan polarisasi yang tajam.

2. Faktor Terjadinya Polarisasi Politik di Masyarakat Desa Tongko Kecamatan Baroko Pasca Pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang 2024

Menjadi pertanyaan awal yang harus ditanyakan adalah mengapa pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang tahun 2024 sangat memanas. Setelah peneliti mencari informasi dan melakukan penelitian dari beberapa informan, setidaknya ditemukan 2 hal mendasar yang menyebabkan pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang tahun ini sangat memanas, yaitu:

a. Hubungan Keluarga

Hubungan keluarga yang dekat di antara dua calon yang sama-sama kuat menjadi salah satu penyebab pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang tahun ini memanas. Pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 merupakan dua kandidat yang memicu panasnya pemilihan Bupati kabupaten Enrekang tahun ini.

“Ini yang menjadi permasalahan karena kedua calon yang sama-sama kuat ini mereka saling sepupu, dan keduanya asalnya dari Desa Tongko meskipun mereka saat ini tidak berdomisili di Desa Tongko. Dua-duanya juga merupakan keluarga saya, jadi saya sebenarnya juga bingung harus memilih yang mana, bukan hanya saya namun banyak.”¹¹

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman, salah satu tokoh agama di kecamatan Baroko khususnya di desa Tongko yang juga sebagai tokoh pendidik di MTs Muhammadiyah Tongko, ketika ditanya mengenai penyebab memanasnya pemilihan bupati kabupaten Enrekang tahun ini.

“Sebelum pemilihan ini dilaksanakan, 2 calon ini (pasangan calon nomor 1 dan 2) yang keduanya juga saling sepupu, sebenarnya mereka memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk didamaikan, itulah mengapa ketika keduanya sama-sama berambisi untuk maju sebagai calon Bupati Enrekang tahun ini sangat memanas, tidak hanya 2 kandidat ini yang memanas namun turun sampai tim sukses dan lapisan masyarakat.”¹²

Disamping menimbulkan perpecahan dalam lingkungan keluarga juga sampai pada lingkungan masyarakat, atas dasar kesetiaan dan kefanatikan pada pilihannya masing-masing membuat masyarakat lupa akan pentingnya saling menghargai perbedaan pilihan. Konflik yang muncul pada diri masing-masing pasangan calon mestinya tidak sampai pada telinga masyarakat melihat dampak yang ditimbulkan sangat beresiko untuk membut perpecahan.

b. Tidak Puas dengan Kursi Jabatan

Calon Bupati Kabupaten Enrekang nomor urut 2 dianggap tidak puas dengan kursi jabatan yang telah diduduki setelah terpilih sebagai Anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2024-2029. Dari 9 anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2024-2029 yang terpilih dan

¹¹ Rahmawati (43), Warga Desa Tongko, Wawancara, Tongko, 16 Desember 2024.

¹² Abdurrahman (43), Guru MTs Muhammadiyah Tongko, Wawancara, Tongko, 15 Desember 2024.



memilih mundur sebelum dilantik di antaranya adalah Muhammad Yusuf, yang memilih maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Enrekang 2024.¹³

“Sebenarnya kami sangat kecewa haji dengan Haji Ucu (Muhammad Yusuf), kemarin telah diberi kursi jabatan di DPRD Sulawesi Selatan, namun belum sempat menikmati kursinya dia malah memilih untuk mundur, itu yang membuat kami kecewa. Apalagi setelah diketahui dia mundur karena mau mencalonkan sebagai Bupati itu sangat membuat kami kecewa karena dia akan melawan sepupunya sendiri. Maksud kami, kenapa tidak nikmati dulu kursi jabatannya di DPRD, biarlah sepupunya terlebih dahulu maju sebagai Bupati tahun ini.”¹⁴

Rasa kecewa di hati masyarakat akibat permainan politik yang sangat luar biasa merupakan pemicu polarisasi di masyarakat Desa Tongko bisa tumbuh. Mata kita akan semakin terbuka untuk melihat bahwa sejatinya masyarakat hanya dijadikan sebagai objek permainan politik di tangan para penguasa.

3. Efek Polarisasi dan Dampaknya pada Keharmonisan Masyarakat di Desa Tongko

Setelah dilaksanakannya pemilu tidak serta merta mengembalikan hubungan sosial masyarakat kembali harmonis. Pemilu memiliki dampak besar bagi hubungan masyarakat yang semula bersatu menjadi terpecah belah. Konflik kerap sekali terjadi meski pemilu sudah selesai. Hal ini termasuk bagian dari kurangnya kesadaran masyarakat bahwa meskipun berbeda pilihan tetapi tetap satu kesatuan dan satu tujuan yaitu demi kebaikan NKRI.

Beberapa masyarakat pasca berlangsungnya pemilu tetap memiliki hubungan sosial masyarakat yang harmonis, karena masyarakat tersebut bisa menerima dengan ikhlas dan lebih menyadari pentingnya menghormati dan menerima hasil pemilu. Dengan kesadaran masyarakat seperti ini akan dapat membangun hubungan sosial yang lebih kuat, dan tentu akan sangat berpengaruh terhadap hubungan sosial dalam membangun harmonisasi masyarakat. Namun tidak semua masyarakat menghormati dan bisa menerima keputusan hasil pemilu. Masih banyak masyarakat yang tidak menerima dengan ikhlas sehingga menyuarakan pendapat mereka dan memicu terjadinya perpecahan. Tidak menerima hasil pemilu akan berdampak pada hilangnya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat tidak menerima terhadap pilihan mereka yang tidak menang.

Polarisasi politik terjadi apabila masyarakat terpecah menjadi 2 kubu yang saling berlawanan baik dalam penentuan, pemilihan, sudut pandang, kepercayaan serta ideologi dalam menentukan pilihan masyarakat atau bisa disebut masyarakat yang beranggapan politik ini sebagai kita vs mereka. Hal ini didasari oleh 2 kubu yang saling berlawanan, memiliki fanatisme yang sangat tinggi terhadap pilihannya serta adanya perbedaan pendapat atas pilihannya. Polarisasi politik akan sangat mudah terjadi ketika masyarakat atau para pendukung menghadapi

¹³<https://makassar.tribunnews.com/2024/09/10/9-anggota-dprd-sulsel-terpilih-mundur-sebelum-dilantik-tinggalkan-gaji-rp56-juta-per-bulan> (27 Desember 2024).

¹⁴ Rahmawati (43), Warga Desa Tongko, Wawancara, Tongko, 16 Desember 2024.



suatu isu, seperti perbedaan ideologi, pilihan dan prinsip suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka kelompok satu akan menganggap bahwa prinsip serta ideologi kelompok yang lain cenderung salah dipikiran mereka, begitu pula sebaliknya.¹⁵

Dampak dari terjadinya polarisasi politik sangatlah berbahaya, jika melihat makna dari polarisasi yang bisa kita pahami, bahwa ketika terjadi hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan yang saling bertentangan, permusuhan diantara kedua belah pihak, serta dapat terjadinya kekerasan dari kelompok-kelompok yang berlawanan dengan prinsip yang dipegang oleh masing-masing kelompoknya tersebut. Hal ini disamping merugikan kelompok masyarakat juga berdampak pada demokrasi yang ada di Indonesia. Berikut beberapa efek polarisasi dan dampaknya pada keharmonisan masyarakat di desa Tongko pasca pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang 2024:

a. Fragmentasi Sosial

Pemilihan Bupati serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang lalu, di Kabupaten Enrekang sendiri tepatnya di Desa Tongko Kecamatan Baroko memberikan perhatian yang besar terhadap masyarakat setempat pasca pemilihan itu terjadi. Kabupaten Enrekang yang tahun ini terdengar memanas, tidak hanya berdampak pada masing-masing pasangan calon namun bahkan lebih memanas bagi para pendukung di seluruh pelosok daerah kabupaten Enrekang.

Masyarakat yang terpolarisasi cenderung terpecah menjadi kelompok-kelompok eksklusif dan mengurangi interaksi kepada masyarakat berbeda kelompok. Hal ini merupakan kejadian nyata yang terlihat di masyarakat desa Tongko, masyarakat saling berkelompok-kelompok dan tidak berbaur dengan masyarakat lain yang berbeda pilihan.

“Hampir di setiap pemilu di kabupaten Enrekang, pemilu apapun itu masyarakat pasti berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompok pilihannya masing-masing, masyarakat lain yang berbeda pilihan dengannya akan dianggap sebagai musuh dari kelompok lain.”¹⁶

Dapat kita pahami bahwa polarisasi politik itu bisa membuat perpecahan di negara Indonesia, dengan kefanatikan pendukung tertentu bisa menyebabkan perpecahan diantara kedua kelompok, tidak terciptanya pemilu yang damai melainkan terciptanya pemilu yang panas, saling menyebar fitnah, stigma yang buruk serta adanya ancaman dari salah satu pihak dan lain sebagainya.

b. Gangguan pada Kehidupan Sehari-hari

Konflik yang disebabkan oleh polarisasi politik bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan dapat mengakibatkan keretakan hubungan keluarga. Hal ini sejalan dengan

¹⁵ Syifa Rianadiwa, dkk, “Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024”, *Jurnal Sosial Humaniora* 4 no. 1 (2024): 172.

¹⁶ Yusni Nurdin (38), Guru MTs Muhammadiyah Tongko, *Wawancara*, Tongko, 15 Desember 2024.



pandangan bapak Abdurrahman yang merupakan warga masyarakat desa Tongko dan tokoh agama di desa tersebut.

“Melihat hal seperti ini di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat prihatin dan kasihan, mereka yang berseblahan rumah dan bahkan keluarga sendiri tidak saling menyapa, hampir setiap pemilihan di Kabupaten Enrekang kita akan diperhadapkan dengan hal semacam ini, namun tahun ini merupakan pemilihan Bupati yang benar-benar memanas.”¹⁷

Keretakan sosial yang diakibatkan oleh polarisasi politik tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, namun juga berdampak pada kehidupan keluarga. Masyarakat desa Tongko juga memberikan pengakuan bahwa pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang tahun 2024 memang sangat memanas dan dampak yang ditimbulkan baik sebelum dan sesudah pemilihan sangat terasa di tengah-tengah masyarakat.

“Pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang yang kemarin baru saja selesai dilaksanakan memang sangat memanas. Namun baru tahun ini dampaknya sangat terasa pada masyarakat desa Tongko, tahun-tahun sebelumnya memang juga memanas namun tidak sama tahun ini. Dan saya sendiri rasakan tetangga yang ada di depan rumah yang juga merupakan keluarga dekat saya setelah pemilu dilaksanakan sudah jarang berkomunikasi gara-gara berbeda pilihan.”¹⁸

Tidak diketahui secara pasti butuh berapa lama masyarakat desa Tongko bisa kembali damai pasca pemilihan ini berlangsung, namun yang pastinya tahun ini akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Biasanya perpecahan ini akan hilang dengan sendirinya setelah berjalan 1 sampai 2 bulan, namun tahun ini tidak dapat dipastikan akan berjalan berapa lama, melihat tahun ini suasana pemilihannya sangat memanas. Selain itu, tidak lama setelah pemilihan bupati akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala desa, tentu hal yang sebelumnya memanas akan semakin memanas, dan bisa jadi yang sebelumnya kawan akan menjadi lawan begitupun sebaliknya.”¹⁹

Perpecahan dan perselisihan akan mempersempit ruang jalan kehidupan, begitu pengakuan dan apa yang dirasakan oleh ibu Rahmawati salah masyarakat desa Tongko yang merasakan efek dan dampak polarisasi politik, hal ini jika terus berlanjut tumbuh dalam ruang hidup masyarakat maka cita-cita bangsa untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk akan sulit untuk dicapai.

c. Menurunnya Kredibilitas Masyarakat

Masyarakat yang terpolarisasi sering menyaksikan kontroversi publik mengenai pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan secara faktual. Selama proses ini, fakta dan

¹⁷ Abdurrahman (43), Guru MTs Muhammadiyah Tongko, *Wawancara*, Tongko, 15 Desember 2024.

¹⁸ Rahmawati (43), Warga Desa Tongko, *Wawancara*, Tongko, 16 Desember 2024

¹⁹ Yusni Nurdin (38), Guru MTs Muhammadiyah Tongko, *Wawancara*, Tongko, 15 Desember 2024.



keberanian moral semakin hilang bobotnya, karena semakin banyak orang yang menyesuaikan diri dengan pesan-pesan dari kelompok mereka Sendiri. Pelaku sosial dan politik, seperti jurnalis, akademisi, dan politisi terlibat dalam penyampaian cerita bersifat partisan atau menanggung kerugian sosial, politik, dan ekonomi yang semakin besar. Para pemilih kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik. Dukungan terhadap norma dan demokrasi menurun.²⁰ Semakin sulit bagi masyarakat untuk bertindak berdasarkan prinsip moral dan mengacu pada kebenaran atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang ada ketika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan partai.

d. Dampak terhadap Pemerintah

Polarisasi terbentuk dengan membuat kompromi, konsensus, interaksi, dan tidak adanya toleransi bagi individu dan aktor politik di kedua kubu yang berbeda. Polarisasi yang merusak seringkali melemahkan penghormatan terhadap norma-norma demokrasi, merusak proses dasar legislatif, melemahkan sifat peradilan yang non-partisan, dan memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini memperburuk intoleransi dan diskriminasi, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kekerasan di seluruh masyarakat serta berpotensi menyebabkan kemunduran demokrasi.²¹

Dalam kasus polarisasi politik yang merugikan di setiap negara, sering kali pihak yang menang mengecualikan pihak yang kalah dari posisi kekuasaan atau menggunakan cara untuk mencegah pihak yang kalah menjadi ancaman dimasa depan. Dalam situasi seperti ini, pihak yang kalah biasanya mempertanyakan legitimasi institusi yang membiarkan pihak yang menang menciptakan hegemoni, yang menyebabkan masyarakat semakin sinis terhadap politik. Di negara-negara ini, polarisasi politik sering dilihat sebagai permainan kekuasaan yang mengacu pada diri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan masyarakat, mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain.

4. Strategi Membangun Harmonisasi Masyarakat di Desa Tongko Pasca Pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang 2024

Masyarakat yang terpecah akibat pemilu merupakan kewajiban bersama untuk mengembalikan keharmonisan yang sebelumnya terbangun. Melihat efek dan dampak polarisasi politik yang telah dijelaskan di atas tentu memberikan perhatian yang sangat dalam karena dapat memecah belah masyarakat. Para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh pendidik sampai pada tokoh agama yang dianggap sebagai figur di masyarakat harus memberikan solusi dan jawaban

²⁰ Syifa Rianadiwa, dkk, "Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024", *Jurnal Sosial Humaniora* 4 no. 1 (2024): 173.

²¹ Syifa Rianadiwa, dkk, "Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024", *Jurnal Sosial Humaniora* 4 no. 1 (2024): 173.



kepada masyarakat awam. Perpecahan di tengah-tengah masyarakat jika dibiarkan begitu saja akan mengganggu kestabilan dalam melangsungkan kehidupan sosial bermasyarakat.

Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk membangun harmonisasi masyarakat di desa Tongko Pasca Pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang 2024:

a. Menanamkan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila

Menanamkan dan mengimpelentasikan nilai-nilai Pancasila dalam pemahaman dan pandangan masyarakat bisa menjadi metode penyelesaian polarisasi politik di Indonesia khususnya di masyarakat desa Tongko Kecamatan Baroko. Emilia Polanen mengungkapkan, bahwa polarisasi politik merupakan alat politik yang diartikan sebagai pembatas antara kita dan mereka dan untuk memata-matai kelompok yang dirasa sebagai tatanan.²² Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia dan pandangan hidup (*way of life*) apabila nilainya diimplementasikan di masyarakat bisa menjadi solusi dan tidak menimbulkan efek buruk polarisasi politik. Nilai- nilai yang tertera pada rumusan setiap sila yang ada pada pancasila yang dipercaya sebagai landasan filosofis, dianggap serta diyakini suatu (hakikat, nilai-nilai dan norma-norma) yang paling kongkritn, paling baik, paling adil, paling bijaksana dan paling sesuai dengan untuk dijadikan sebagai dasar NKRI. Pancasila adalah landasan identitas, moralitas dan jati diri serta penyelamat bangsa Indonesia.

Nilai-nilai yang ada pada setiap pasal Pancasila dimanifestasikan sebagai cita-cita dan tujuan hukum, sebaga bentuk kongkrit dan rumusan untuk mencapai keadilan, melindungi segenap bangsa, dan tumpah darah seluruh masyarakat Indonesia. Asas-asas demokrasi Pancasila adalah budaya kebebasan rakyat yang mempunyai karakteristik dan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip pokok demokrasi bisa dikatakan sebagai berikut:

- 1) Demokrasi memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2) Pengambilan ketetapan yang mesti dijalankan dengan musyawarah mufakat
- 3) Badan/lembaga peradilan merdeka
- 4) Adanya partai politik sebagai media untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan tempat disalurkanannya aspirasi masyarakat
- 5) Berfungsi sebagai pelaksana pemilu
- 6) Kedaulatan tertinggi dimiliki oleh rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945)
- 7) Terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
- 8) Dilaksanakannya demokrasi yang bertanggung jawab dibarengi moral yang telah diatur oleh tuhan, serta mempunyai adab terhadap diri sendiri, masyarakat, serta negara ataupun diluar itu

²² Fernando Pratiwi Saifullah, "Model Penanaman Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Polarisasi Politik Pemilu 2024 di Indonesia", Prosding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022, h. 126.



9) Memprioritaskan tujuan dan juga cita-cita bangsa

10) Pemerintah yang patuh terhadap hukum.²³

b. Menanamkan dan Mengimplementasikan Nilai Keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara dan bangsa majemuk yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, ras, agama, budaya, dan memiliki wilayah yang begitu luas. Dalam merealisasikan kehidupan berbangsa, negara Indonesia memiliki pondasi yang dikenal dengan pilar-pilar kebangsaan atau 4 (empat) konsensus dasar berbangsa. Empat Konsensus Dasar Berbangsa ialah hakikat nilai-nilai kebangsaan yang berdasar dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.²⁴

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kesepakatan dasar yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Keberadaan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika diantaranya adanya nilai toleransi, nilai gotong-royong dan nilai keharmonisan. Semua nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika mesti diimplementasikan agar langsung dirasakan manfaatnya dalam mendirikan kehidupan yang harmonis.

c. Menanamkan Nilai-Nilai Keagamaan

Masyarakat desa Tongko merupakan masyarakat yang religius, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masjid yang dibangun di setiap dusun dan aktifnya ibu-ibu majelis ta'limnya. Melalui pendekatan agama dan menanamkan nilai-nilai keagamaan kedalam hati masyarakat juga merupakan upaya yang sangat positif untuk menstabilkan kembali keharmonisan masyarakat di desa Tongko.

“Kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat, bahwasanya Tuhan lebih jauh telah menentukan siapa yang akan menjadi Bupati di Kabupaten Enrekang tahun 2024, kita tidak mendahului takdir yang telah digariskan oleh Tuhan, namun seandainya masyarakat desa Tongko memahami akan hal ini maka tidak akan ada perpecahan pasca pemilu itu dilaksanakan.”²⁵

Hal ini tentu tidak mudah bagi para da'i untuk menyuarakan di tengah-tengah masyarakat yang kian memanas, meskipun masyarakat desa Tongko dikenal sebagai masyarakat yang religius namun hal itu perlahan surut karena doktrin dari pergerakan politik.

“Saya dengan teman saya difitnah oleh masyarakat sebagai Ustadz yang membagi-bagikan uang dari salah satu pasangan calon, tuduhan ini sangat menggores hati saya.

²³ Fernando Pratiwi Saifullah, “Model Penanaman Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Polarisasi Politik Pemilu 2024 di Indonesia”, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022, h. 127.

²⁴ Maryono, “Implementasi Nilai Keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika: Pembelajaran bagi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 3 no. 2 (2023): h. 144.

²⁵ Abdurrahman (43), Guru MTs Muhammadiyah Tongko, Wawancara, Tongko, 15 Desember 2024.



Bertahun-tahun saya tinggal di desa Tongko dan di angkat oleh pemerintah kabupaten sebagai tenaga ahli keagamaan di desa ini, memberikan pengajaran keagamaan di masyarakat, mengajar anak-anak mereka disini, namun justru saya difitnah dengan fitnah yang sangat luar biasa.”²⁶

Keterangan yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman di atas tentu membuka pikiran bagi kita, bahwa sebenarnya penguasa hanya menjadikan masyarakat sebagai objek permainan politik yang tidak hanya menyerang dalam sendi kehidupan masyarakat sehingga membuat perpecahan namun justru sampai pada menyerang figur agama di masyarakat. Figur agama yang difitnah tentu akan mempersempit jalan bagi mereka untuk memberikan pencerahan di tengah masyarakat, melihat masyarakat pasti akan memberikan penilaian negatif dan mulai enggan untuk mengundang mereka, padahal justru saat seperti inilah masyarakat sangat membutuhkan dan perlu untuk diberikan kesadaran.

d. Membangun Ruang Dialog

Membangun ruang dialog dengan menghadirkan penengah merupakan salah satu cara untuk bisa kembali membangun keharmonisan masyarakat. Dengan berdiskusi akan dapat membantu mempertemukan pandangan yang berbeda, dengan berdiskusi akar dari masalah akan terpecahkan dan dapat saling memberikan pandangan dan nasehat. Ibu Yusni juga memberikan keterangan yang sama terkait pentingnya mempertemukan dua kelompok yang saling berpecah kemudian membangun ruang dialog di dalamnya.

“Mempertemukan antara dua kubu yang terpecah kemudian saling mendiskusikan persoalan yang terjadi pasca pemilihan ini berlangsung merupakan langkah positif dan menurut saya lebih dewasa untuk dilakukan, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi muncul kesalahpahaman bahkan sampai pada perpecahan di tengah-tengah masyarakat desa Tongko.”²⁷

Konflik yang terus berkelanjutan tanpa mencari titik damai akan sulit untuk diselesaikan, langkah yang diambil dengan membangun ruang dialog merupakan cara yang lebih dewasa seperti yang disampaikan oleh ibu Yusni. Persoalan ini jika tidak diselesaikan secara musyawarah maka akan terus menjalar aura negatifnya di tengah-tengah masyarakat, semakin jauh maka akan semakin sulit ditemukan titik damainya.

e. Partai Politik dan Pemimpin yang Berperan Aktif

Menurut Philippe C. Schmitter's, ada tiga aktor penting yang menjadi perantara atas tersalurkan kepentingan masyarakat, yaitu Parpol (*the political parties*), asosiasi kepentingan (*the interest associations*) dan yang terakhir gerakan sosial (*the social movements*).²⁸ Fungsi partai politik sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

²⁶ Abdurrahman (43), Guru MTs Muhammadiyah Tongko, *Wawancara*, Tongko, 15 Desember 2024.

²⁷ Yusni Nurdin (38), Guru MTs Muhammadiyah Tongko, *Wawancara*, Tongko, 15 Desember 2024.

²⁸ Bayu Dwi Anggono, “Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Konstitusi* 16 no. 4 (2019): h. 703-705.



1) Wadah internal organisasi

Parpol sebagai wadah internal organisasi yaitu parpol mempunyai peran organisasi yang sangat penting dalam membina, memberi pembekalan serta kaderisasi agar parpol menjadi lebih kokoh.

2) Wadah eksternal organisasi

Parpol sebagai wadah eksternal yang mana organisasi ini mesti memiliki peran bagi rakyat, bangsa dan negara agar terciptanya moral dan etika yang senantiasa tumbuh dan terjaga di masyarakat.²⁹

Disamping itu, pemimpin di berbagai level juga harus menjadi teladan dalam membangun komunikasi yang harmonis di masyarakat dan merangkul semua pihak. Tim sukses dari masing-masing pasangan calon maupun semua pasangan calon baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih harus dapat memberikan contoh yang baik di masyarakat, karena jika hubungan mereka baik maka pendukung di bawahnya akan ikut membaik.

Kemarin di acara nikah sempat bertemu dengan sepupu saya yang menggunakan baju dari paslon tertentu dan saya suruh menggantinya, kemudian setelah itu saya bertemu dengan saudara saya juga menggunakan baju dari paslon tertentu saya pun suruh menggantinya, keduanya ini merupakan jenderal (tim sukses) dari masing-masing paslon. Kemudian setelah itu saya mempertemukan mereka dan memberikan nasehat kepadanya, alhamdulillah mereka kembali berdamai. Karena dua tim sukses ini berdamai para bawahannya pun ikut berdamai.³⁰

Peran seorang pemimpin di tengah masyarakat yang terpecah pasca pemilihan Bupati kemarin khususnya di Kabupaten Enrekang merupakan senjata terbaik untuk memberikan kedamaian dan keharmonisan. Pemimpin tidak boleh menutup mata atas kejadian ini, justru dia harus memberikan peranan aktif disamping sebagai bentuk tanggungjawab juga sebagai bentuk kewajiban yang harus dipikul.

D. KESIMPULAN

1. Polarisasi merupakan pembagian masyarakat dalam menyikapi isu-isu politik. Polarisasi politik merujuk kepada terpecahnya masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan politik, yang mana dalam perpecahan ini muncul rasa saling tidak percaya dan kebencian, sehingga memunculkan permusuhan. Ilmuan politik membagi dua tingkatan polarisasi politik yaitu polarisasi elit dan polarisasi massa, polarisasi elit berpusat pada polarisasi elit politik seperti pengurus partai dan pejabat terpilih. Sedangkan polarisasi massa berfokus pada massa seperti para pemilih atau masyarakat umum.
2. Faktor penyebab polarisasi politik di masyarakat desa Tongko kecamatan Baroko pasca

²⁹ Firmazah, *Mengelola Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 69.

³⁰ Abdurrahman (43), Guru MTs Muhammadiyah Tongko, *Wawancara*, Tongko, 15 Desember 2024.



pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang tahun 2024 ada 2, yaitu hubungan keluarga 2 pasangan calon yang sangat dekat dan masyarakat menilai calon nomor urut 2 tidak puas dengan kursi jabatan.

3. Efek polarisasi dan dampaknya pada keharmonisan masyarakat di desa Tongko pasca pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang 2024 yaitu fragmentasi sosial, gangguan dalam kehidupan sehari, menurunnya kredibilitas masyarakat dan berdampak terhadap pemerintah.
4. Strategi yang dapat dilakukan untuk membangun harmonisasi masyarakat di desa Tongko Pasca Pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang 2024 yaitu menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, menanamkan dan mengimplementasikan nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika, menanamkan nilai-nilai keagamaan, membangun ruang dialog, serta partai politik dan pemimpin yang berperan aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Firmazah. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.

O'donnel, Guillermo dan Philippe C. Schmitter. *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Jakarta: LP3ES, 1993.

Syamsuddin dan Damaianti. *Metode Penelitian dan Pendekatan Bahasa*. Bandung: Remaja Rosdakarnya, 2007.

Sihwidodo, Winarko. *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Pasca Pemilu Serentak 2024 Guna Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lemhannas RI, 2024.

Jurnal:

Mansyur, Ibnu Chaerul. "Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik* 11, no. 1 (2023): h. 1-29.

Khasanah, Isrofiah Laela dan Fadli Zumadila Wawuan. "Polarisasi Politik dan Rekonsiliasi Melalui Halal Bihalal. *Jurnal Ilmu Muqoddimah* 7 no. (2023): h. 409-435. *Jurnal Sosial Humaniora* 4 no. 1 (2024): 169-179.

Maryono. "Impelementasi Nilai Keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika: Pembelajaran bagi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024." *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian*



dan Pengembangan 3 no. 2 (2023): h. 132-156.

Anggono, Bayu Dwi. “Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Konstitusi* 16 no. 4 (2019): h. 700-723..

Rianadiwa, Syifa, dkk. “Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024”. *Jurnal Sosial Humaniora* 4 no. 1 (2024): 169-179.

Skripsi:

Wahyuni. “Pengembangan Koleksi Jurnas Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.” *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2013.